

Harmony and The Role of Actors to Actualize of Social Resilience in Purworejo and Tabanan

Irin Oktafiani⁽¹⁾, Norman Luther Aruan⁽¹⁾, Rahmat Saleh⁽¹⁾, Angela Iban⁽²⁾
rahmat.saleh@lipi.go.id

⁽¹⁾Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Indonesia

⁽²⁾Peneliti pada Pusat Penelitian Kewilayahan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Indonesia

Rukun and Tri Hita Karana had been conceptualized by scholars in anthropology as harmony in the Javanese and Balinese people from the late 20th until the early 21st century. These two kinds of philosophies still relevant amid the significant changes in the so-called modern society of Javanese and Balinese. This paper shows how rukun and Tri Hita Karana, which have been renowned along time will ensure the social resilience in the people of Purworejo and Tabanan when they are facing challenges. These two regions also remain still by the supports of organic actors who are ready to secure the harmony in the society. Data in this paper is collected from the focus group discussion and in-depth interviews in Purworejo and Tabanan as part of the research Penelitian Pembentukan Desa Berketahanan Sosial which is conducted in 2019 by Social Welfare Research and Development Agency of The Ministry of Social Services of Indonesia. Furthermore, this paper analyzed the meaning of harmony in the Purworejo and Tabanan people and their ability to face any changes. The results are; (1) Rukun and Tri Hita Karana still relevant in the people of Purworejo and Tabanan; (2) there are some organic actors who then help the society to keep the long-live philosophy of rukun and Tri Hita Karana.

Keywords: Harmony, Rukun, Tri Hita Karana, Actors, Social Resilience

Filosofi *Rukun* dan *Tri Hita Karana* pada masyarakat Jawa dan Bali dikonsepsikan sebagai harmoni dalam kajian antropologi pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Kedua filosofi ini dianggap masih relevan di tengah perubahan masyarakat modern di Jawa dan Bali. Tulisan ini akan memperlihatkan bagaimana filosofi *Rukun* dan *Tri Hita Karana* yang sudah ada di dalam masyarakat masih relevan dan dapat menjamin ketahanan sosial masyarakat Purworejo dan Tabanan dalam menghadapi perubahan. Ditambah lagi kedua daerah tersebut telah memiliki dukungan melalui kehadiran aktor-aktor organik yang siap menjadi penjaga bagi keseimbangan di dalam masyarakat. Sumber data diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam di Purworejo dan Tabanan sebagai bagian dari Penelitian Pembentukan Desa Berketahanan Sosial yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan analisis makna harmoni dan pendekatan *agency* untuk melihat pola pikir dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Temuan dari penelitian ini adalah; (1) Filosofi rukun dan Tri Hita Karana masih relevan dalam perkembangan masyarakat di Purworejo dan Tabanan; (2) Aktor-aktor dalam masyarakat lahir secara organik sebagai penjaga keseimbangan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Harmoni, Rukun, Tri Hita Karana, Aktor, Ketahanan Sosial

Kontribusi: Dalam artikel ini, Irin Oktafiani, Norman Luther Aruan, Rahmat Saleh, dan Angela Iban berperan sebagai Kontributor Utama.

PENDAHULUAN

Tulisan ini adalah studi mengenai bagaimana harmoni dalam masyarakat menjadi penopang untuk menciptakan ketahanan sosial atau lingkungan kehidupan sehari-hari yang mapan. Selain lahir dari bekal-bekal filosofi budaya turun temurun masyarakat, harmoni juga tercipta dari hadirnya para aktor yang kemudian disebut sebagai pranata sosial. Tulisan ini berangkat dari hasil penelitian tahun 2019 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial, Republik Indonesia, dalam rangka Pembentukan Desa Berketahanan Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan Desa Berketahanan Sosial pada tujuh kabupaten yang belum memiliki Penyuluh Sosial Masyarakat, dua di antaranya adalah Purworejo dan Tabanan. Hal ini dikarenakan Penyuluh Sosial Masyarakat di dalam pokok kerja Kementerian Sosial dianggap sebagai ujung tombak pembentukan Desa Berketahanan Sosial. Penulis memilih Purworejo dan Tabanan sebagai obyek dari tulisan dengan dasar bahwa kedua daerah ini menunjukkan kondisi ketahanan sosial turut tercipta dengan keberadaan pranata sosial atau para aktor di dalam masyarakat.

Harmoni merupakan salah satu ide yang lahir dari masyarakat. Sebagai sebuah pengetahuan, kebudayaan melahirkan nilai dan ide untuk mewujudkan ritus kehidupan sehari-hari yang ideal bagi para pelakunya, yaitu masyarakat. Hal ini tentu tidak terlepas bahwa sebagai makhluk sosial, hidup suatu individu adalah bagian dari masyarakat luas (Mulder, 1983) sehingga membutuhkan suatu sistem nilai dan ide untuk menjalankannya. Dalam budaya yang berkembang pada masyarakat Jawa, nilai dan ide tersebut tumbuh menjadi sebuah prinsip kehidupan seperti yang dijelaskan oleh Adamson (2007), salah satunya adalah rukun. Menurut pandangan Geertz (dalam Jay, 1969), rukun dalam masyarakat Jawa telah membentuk sistem pengelolaan relasi dan interaksi di antara mereka, bahwa rukun menjadi kaidah dasar yang paling menentukan. Tidak hanya menjelaskan sebuah kondisi, nilai rukun juga dimaknai oleh masyarakat Jawa sebagai cara bertindak. Pada kajian Antropologi, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tertuntun oleh pengetahuannya untuk melakukan suatu perilaku. Itu sebabnya rukun juga dapat diterjemahkan sebagai *social harmony*, yaitu sebuah keadaan atau kondisi sosial yang tentram, aman, dan tanpa perselisihan (Jay, 1969). Lebih luas dari itu, Hawkins (1996) menekankan bahwa kondisi rukun dianggap sebagai prinsip resolusi konflik dan filosofi untuk menjaga relasi sosial dalam masyarakat Jawa. Bagi Hawkins, rukun bukan

sekadar mekanisme praktis yang ada di dalam masyarakat tradisional, tetapi juga merupakan filosofi yang akan terus relevan sekalipun masyarakat berubah menjadi modern.

Sementara itu, konsep harmoni yang sama berkembang dalam masyarakat Bali melalui filosofi Tri Hita Karana (Ramstedt 2014:61). Tri Hita Karana merupakan filosofi yang berhubungan dengan agama Hindu dan mengatur tiga jenis relasi yang ada di dalam hidup manusia. Relasi tersebut adalah hubungan manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), hubungan manusia dengan sesama (*pawongan*), dan hubungan manusia dengan alam (*palemahan*) (lihat Warren, 2007:172; Sukarma, 2016:88). Tiga unsur tersebut telah mewakili mikrokosmos dan makrokosmos atau segmen-segmen kehidupan manusia, yaitu sosial, lingkungan, dan spiritual yang membentuk suatu kesatuan dimana manusia menjadi inti pelakunya. Kosmologi ini menunjukkan bahwa kebahagiaan, kemakmuran, dan harmoni tidak diberikan oleh Sang Ilahi dan alam tanpa upaya manusia, untuk menjaga ketahanan hubungan tersebut.

Dua sistem ide masyarakat yang berkembang pada masyarakat Jawa dan Bali di atas, yaitu rukun dan Tri Hita Karana, menunjukkan perannya untuk menjaga keseimbangan dan memastikan adanya harmoni di dalam masyarakat. Tulisan ini akan melihat bahwa harmoni dalam masyarakat Purworejo dan Tabanan masih dirasakan melalui keberadaan filosofi rukun dan Tri Hita Karana. Terdapat argumentasi bahwa filosofi harmoni merupakan suatu hal bentukan negara dan merupakan ciri dari masyarakat tradisional. Namun, di dalam tulisan ini penulis menemukan bahwa sekalipun masyarakat mengalami dinamika, misalnya kemajuan teknologi, filosofi rukun dan Tri Hita Karana masih terus memiliki peran menjadi penjaga keharmonisan dalam masyarakat. Di sisi lain, hal tersebut pada nyatanya tidak berdiri sendiri, namun juga didukung oleh adanya aktor-aktor yang lahir secara organik di dalam masyarakat Purworejo dan Tabanan, sehingga semakin mendukung kelanggengan konsep harmoni tersebut. Tulisan ini akan terbagi ke dalam dua bagian pembahasan. Pertama, penulis akan menggambarkan kondisi terkini masyarakat Purworejo dan Tabanan yang kemudian dianalisis menggunakan konsep rukun (Hawkins, 1996) dan Tri Hita Karana (Sukarma, 2016). Kedua, adalah bagian munculnya aktor-aktor secara organik yang mendukung harmoni di dalam masyarakat yang akan dianalisis melalui modalitas *agency as intention* (Ortner, 2011). Penulis melihat keberadaan aktor-aktor di dalam masyarakat Purworejo

dan Tabanan tidak bisa dilihat sebagai kemampuan individu karena memiliki otoritas lebih tinggi dari yang lain, tetapi didasari oleh kesadaran masyarakat yang memiliki pola pikir dan tujuan yang sama, dalam hal ini adalah filosofi rukun dan Tri Hita Karana.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu diskusi kelompok terpumpun (*Focus Group Discussion* atau *FGD*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), analisis data sekunder, dan observasi. FGD dilakukan dengan para tokoh masyarakat, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat desa di masing-masing kabupaten. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran profil, potensi, dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di tiap desa. Sementara metode wawancara mendalam dilakukan untuk mendalami hasil dari FGD, melihat respon dari informan yang terpilih terkait potensi desa dan masalah-masalah yang dihadapi, sampai munculnya aktor-aktor secara organik di setiap desa. Wawancara mendalam dilakukan secara luring (*offline*) dan daring (*online*) melalui aplikasi *Whatsapp* dengan beberapa informan di Purworejo dan Tabanan. Informan yang dipilih dari Kabupaten Tabanan merupakan seorang penyuluh sosial dan dosen, sedangkan dari Kabupaten Purworejo merupakan dua orang pekerja. Analisis data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menggambarkan kondisi terkini masyarakat Purworejo dan Tabanan. Metode observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kehidupan masyarakat desa dan bagaimana mereka hidup beriringan dengan filosofi rukun di Kabupaten Purworejo dan Tri Hita Karana di Kabupaten Tabanan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Tabanan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan pada karakteristik masyarakat dan merupakan lokasi pembentukan penyuluh sosial yang telah dipilih oleh Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos), Kementerian Sosial. Di sisi lain, kedua daerah tersebut menunjukkan bahwa kondisi harmoni di dalam masyarakat lahir secara organik melalui keberadaan para aktor di dalam masyarakat.

HASIL DAN DISKUSI

A. Konsep Ketahanan dan Definisi Ketahanan Sosial Bagi Pemerintah¹

Teori ketahanan lahir dan banyak dipakai untuk menjelaskan fenomena psikologi, akan tetapi teori ketahanan juga dipakai untuk menjelaskan fenomena dari disiplin ilmu lain. Sebagai contoh, C. S. Holling (1973:14) melihat ketahanan dalam sistem ekologi dan berpendapat bahwa ketahanan merupakan ukuran kegigihan sistem dan kemampuannya dalam menyerap perubahan dan gangguan, sekaligus dapat tetap mempertahankan beberapa hubungan atau relasi di antara populasi atau beberapa variabel yang tersedia. Ketahanan juga menjelaskan bagaimana individu dapat memanfaatkan akses untuk mengatasi efek negatif yang mungkin muncul dari tekanan yang dihadapi, hal ini dinamakan sebagai *coping strategy* (Meadows, et al., 2015:9). Kemudian konsep ketahanan berkembang, tidak hanya mampu menjelaskan strategi bertahan individu tetapi juga dapat menjelaskan strategi yang dilakukan di dalam masyarakat sebagai bagian dari komunitas. Misalnya saja *coping strategy* masyarakat di Ethiopia dan Makassar dalam menghadapi perubahan iklim dengan melakukan migrasi, pembagian kerja, diversifikasi pekerjaan, dan mengurangi luas lahan (lihat Costa, et al. 2013 dan Asmamaw, 2019). Dalam aspek sosial, ketahanan secara khusus dilihat sebagai upaya-upaya advokasi untuk penguatan kapasitas institusi masyarakat (Suwignyo, 2018:94). Bagi Michael Hanisch (2016), agar lebih memahami konsep ketahanan, perlu mengetahui apa dan siapa yang penting untuk bertahan beserta tujuannya, bagaimana ketahanan harus dipromosikan, serta siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Apabila dapat disimpulkan, penulis berargumentasi bahwa ketahanan sosial dapat dilihat sebagai upaya-upaya yang dilakukan masyarakat untuk menjaga satu tatanan yang dianggap ideal dan bagaimana masyarakat merespon tekanan-tekanan yang melanda dalam kehidupan mereka.

Pemerintah Indonesia juga sudah merumuskan konsep ketahanan sosial di dalam masyarakat yang tercantum pada Keputusan Menteri Sosial nomor 12 tahun 2006. Ketahanan sosial masyarakat merupakan suatu kemampuan bagi komunitas dalam mengatasi risiko perubahan, ekonomi, dan politik. Risiko dari perubahan ekonomi dan politik dianggap dapat mengganggu kestabilan masyarakat, sehingga penting bagi suatu

¹ Pemakaian istilah ketahanan di Indonesia masih menjadi perdebatan dalam dunia akademis karena dekat dengan program yang dilakukan pemerintah Orde Baru (Suryanto, 2020) dan istilah ini kadang diartikan oleh para akademisi sebagai *resilience* maupun *strength*. Penulis membatasi istilah ketahanan sosial dalam tulisan ini menggunakan konsep *resilience* untuk melakukan analisis karena kedekatan konsepnya dengan istilah ketahanan sosial yang dipakai oleh pemerintah dalam Keputusan Menteri Sosial nomor 12 tahun 2006.

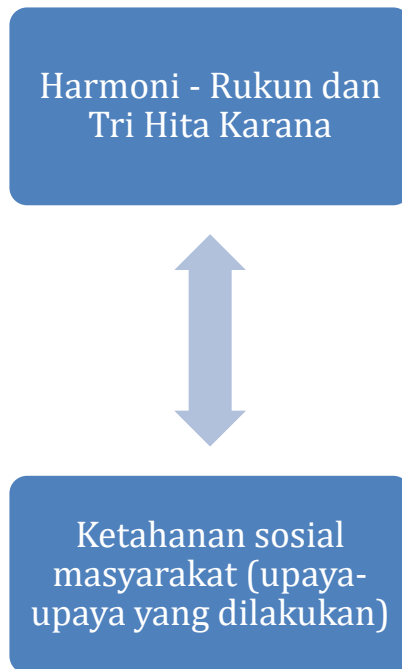
komunitas untuk melewati perubahan tersebut dengan baik. Ketahanan sosial ini diharapkan muncul dimulai dari individu dan institusi keluarga. Suatu komunitas dianggap memiliki ketahanan sosial apabila mampu melindungi dirinya dari keterpurukan dan hal ini dapat dilihat melalui empat dimensi ketahanan sosial.

Empat dimensi ketahanan sosial mencakup elemen yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi keterpurukan dan perlu dikembangkan dalam masyarakat. Dimensi pertama berfokus pada kepastian tersedianya pelayanan dasar di masyarakat dan tingkat perlindungan sosial bagi kelompok rentan, miskin, dan penyandang masalah sosial. Melalui dimensi ini diharapkan pelayanan sosial dapat diakses dengan mudah, dapat dijangkau oleh masyarakat, serta segala kebutuhan kelompok rentan dan penyandang masalah sosial dapat tercukupi. Dimensi kedua berfokus pada tingkat partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial yang ada di lingkungan mereka. Melalui dimensi ini diharapkan relasi sosial yang sudah ada di dalam masyarakat dapat dipelihara dengan baik dan berkelanjutan. Kemudian, dimensi ketiga berfokus pada kemampuan pengendalian konflik sosial dan tindak kekerasan. Melalui dimensi ini peran aktif para aktor atau tokoh dalam masyarakat diharapkan dapat mencegah, maupun menanggapi dan mengatasi konflik sosial yang muncul. Dimensi terakhir adalah pemeliharaan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sosial yang ada di tengah masyarakat. Pada dimensi ini, pemerintah berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga serta melestarikan alam, lingkungan, dan budaya masing-masing daerah.

Lebih lanjut di dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2006, pemerintah menganggap pranata sosial yang ada pada masyarakat menjadi pendukung terwujudnya ketahanan sosial masyarakat. Apabila dapat didefinisikan secara sederhana, pranata sosial merupakan seperangkat nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat yang dilembagakan atau diinstitusikan dalam bentuk formal maupun informal. Hal ini berarti, pranata sosial merupakan suatu sistem yang muncul secara organik dari masyarakat itu sendiri dan lebih lagi bersumber dari nilai dan norma yang dipercaya oleh mereka. Penulis dalam hal ini setuju dengan anggapan mengenai pentingnya pranata sosial dalam mewujudkan ketahanan sosial masyarakat. Sekalipun pranata sosial terlihat penting di dalam penentuan peran dan fungsi anggota masyarakat, tetapi penulis juga melihat bahwa pranata sosial dapat berfungsi dengan baik disebabkan oleh filosofi yang

dipegang di dalam masyarakat. Filosofi rukun dan Tri Hita Karana menjadi landasan bagi masyarakat bertindak dan berelasi dengan pencipta, sesama, dan lingkungannya.

Jadi, ketahanan sosial dapat terwujud oleh karena keberadaan filosofi yang hidup dan bertahan di dalam masyarakat serta diusahakan untuk terus dalam kondisi mapan. Apabila digambarkan, ketahanan sosial dan filosofi harmoni dalam masyarakat merupakan hubungan bolak-balik saling ketergantungan untuk menjaga keseimbangan di dalam masyarakat dan masih dipegang teguh oleh masyarakat. Meskipun hubungan antara harmoni dan ketahanan sosial di dalam masyarakat sifatnya saling ketergantungan, akan tetapi kondisi ini hanya akan dapat tercapai melalui peran-peran penjaga di dalam masyarakat. Hal ini akan dijelaskan dalam lebih lanjut dalam deskripsi untuk memahami kondisi masyarakat di Purworejo dan Tabanan.



Gambar 1. Hubungan bolak-balik saling ketergantungan antara filosofi harmoni dengan ketahanan sosial masyarakat.

B. Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo terbagi dalam 16 kecamatan dan 494 desa/kelurahan. Pada tahun 2018 luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah 103.481 Ha yang terdiri dari 87.105 Ha (84,18%) lahan pertanian dan 16.375 Ha (15,82%) bukan lahan pertanian. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 berjumlah sebanyak

716.477 jiwa. Dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 49,32% dan penduduk perempuan sebanyak 50,68 % (BPS, 2019). Kabupaten Purworejo secara administratif berada pada Provinsi Jawa Tengah dan secara historis lebih dikenal sebagai tanah Bagelen. Secara administratif, Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan beberapa daerah. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Magelang; Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kebumen; dan Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya Kabupaten Kulonprogo. Kabupaten Purworejo dikenal sebagai tanah Bagelen dikarenakan awalnya kawasan ini sangat disegani oleh wilayah lain, karena keberadaan sejumlah tokoh. Misalnya dalam pengembangan ajaran agama Islam di tanah Jawa bagian selatan, tokoh Sunan Geseng dikenal sebagai ulama besar yang pengaruhnya sampai ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Magelang. Selain itu juga terdapat tokoh dalam bidang pendidikan, pertanian dan militer. Seperti WR Supratman Komponis lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”, Jenderal Urip Sumoharjo, Jenderal Ahmad Yani, Letjen Sarwo Edy Wibowo, dan lain sebagainya ².

Potensi Alam dan Sosial di Desa

Kabupaten Purworejo memiliki beberapa potensi, baik alam maupun sosial. Beberapa potensi alam Kabupaten Purworejo di antaranya area pesisir pantai, pertanian, perkebunan, dan pegunungan Menoreh untuk berladang. Selain itu beberapa jenis investasi juga mulai dikembangkan di Kabupaten Purworejo, di antaranya pada industri mebel bambu, industri kayu, dan industri gula dan pariwisata³. Potensi alam di Kabupaten Purworejo ini dapat mendukung kemajuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Di samping itu, masyarakat Kabupaten Purworejo mendukung keberadaan wilayahnya melalui pembentukan lembaga-lembaga sosial --potensi sosial yang dimiliki oleh desa--, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun inisiatif masyarakat. Misalnya seperti keberadaan PKK, Karang Taruna, BUMDES, dan Linmas (Suradi, dkk., 2019).

² (<https://purworejokab.go.id/web/sejarah-kabupaten-purworejo.html>)

³ Hal ini selaras dengan visi Kabupaten Purworejo, yaitu “*Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang semakin sejahtera berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan yang berwawasan budaya, lingkungan dan ekonomi kerakyatan*”

Masalah Sosial di Desa

Pergesekan di antara warga juga merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri terjadi di Purworejo. Secara umum, beberapa permasalahan yang sering muncul di antaranya adalah permasalahan irigasi lahan, perselingkuhan, dan pembagian warisan. Masalah-masalah tersebut dapat muncul dan menimbulkan keresahan di desa. Beruntung, warga memiliki mekanisme penyelesaian konflik sendiri, seperti Kepala Desa atau pemuka agama yang dianggap memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan masalah. Namun, apabila masalah dianggap besar, akan dibawa ke pihak yang berwajib, yaitu kepolisian.

Di sisi lain, seiring perkembangan zaman yang semakin modern, masyarakat desa Kabupaten Purworejo pun sadar mengakui adanya ancaman masalah sosial di wilayahnya, yaitu migrasi masuk yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Migrasi masuk ini menyebabkan munculnya kompleks perumahan baru di tengah masyarakat. Kondisi demikian jika tidak ditangani dengan baik maka khawatir akan memicu gesekan sosial.

“Saya takutnya, masyarakat yang sudah guyub, karena makin ke sini pendatang makin banyak, dan sifatnya orang itu kan beda-beda, ada yang mau bersosialisasi, ada yang tidak, nah itu yang harus kita tangani bersama agar warga masyarakat tetap terhindar dari masalah sosial,” – hasil FGD, 28 November 2019

Menyikapi kondisi di atas, dari pihak aparat desa atau kelurahan akan menggerakkan kader-kadernya untuk menjalankan peran sebagai Penyuluh Sosial Masyarakat (PSM). Kader-kader ini sudah terbiasa aktif menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan, seperti PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan sebagainya. Sehingga hadirnya PSM diharapkan bisa turut serta menjaga harmoni kehidupan masyarakat Kabupaten Purworejo.

Guyub-Rukun Masyarakat Desa

Masyarakat desa di Kabupaten Purworejo pada umumnya menghayati prinsip hidup yang disebut guyub-rukun. Artinya, hidup bersama dalam keadaan saling menghormati, saling membantu, tanpa perselisihan dan pertentangan, sehingga hidup

tenang dan tentram. Guyub-rukun merupakan keadaan yang harus dipertahankan dalam semua hubungan sosial, seperti bertetangga atau bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial di tengah masyarakat, manusia tentu tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Terlebih kehidupan di desa, tetangga menjadi “saudara” terdekat dari rumah yang akan cepat memberikan bantuan. Namun tidak menutup kemungkinan jika tetangga sebelah rumah berbeda keyakinan.

“Guyub itu perasaan komunal untuk bersatu, mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Rukun itu lebih kepada usaha untuk selalu mencari keselarasan.”- wawancara, 1 April 2020

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat desa di Kabupaten Purworejo sebagian besar beragama Islam, dengan afiliasi organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Akan tetapi terdapat juga agama atau keyakinan lain yang dianut masyarakat di sana yaitu Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Penghayat Kepercayaan. Perbedaan dalam beragama atau berkeyakinan tidaklah menjadi “gangguan” bagi masyarakat. Nyatanya mereka bisa hidup berdampingan dengan guyub rukun. Terciptanya kerukunan hidup tidak terlepas dari kesadaran-bersama terhadap nilai-nilai toleransi. Selain itu juga peran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di masyarakat setempat. Misalnya di Desa Kemanukan, Kecamatan Bagelen, yang telah dinobatkan menjadi Kampung Kerukunan Umat Beragama dan menjadi desa percontohan di Jawa Tengah. Masyarakat Desa Kemanukan terkenal dengan budaya toleransi dan keramahan masyarakatnya. Pemerintah Kabupaten mengakuinya bahwa kerukunan masyarakat tersebut menjadi modal positif dalam mendukung pembangunan daerah⁴.

Kerukunan hidup masyarakat desa di Kabupaten Purworejo juga karena adanya tradisi dan adat-istiadat Jawa yang dilestarikan oleh masyarakat setempat. Meski diakui ada pengaruh dari luar, tetapi tidak menjadi sumber masalah sosial. Masyarakat mampu menyaring mana yang sesuai atau tidak sesuai dengan tradisi dan adat istiadat. Justru dari praktik tersebut, menjadi kekuatan untuk meningkatkan kerukunan masyarakat. Misalnya, dalam studinya Purnamasari (2015) mencontohkan yang terjadi pada masyarakat Desa Kamijoro Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, yaitu kegiatan

⁴ <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/desa-kerukunan-umat-beragama/>

selamatan, mitung dino (hari ketujuh duka cita), mitoni, mantu, khitanan, nyukur kuncung, kesripahan (dibantu pas lagi berduka), dan tradisi lainnya. Tradisi-tradisi tersebut tidak hanya dilakukan oleh kelompok Islam, tetapi juga dilaksanakan oleh kelompok Kristen. Menariknya adalah setiap pelaksanaan tradisi tidak hanya mengundang sesama kelompok tetapi juga mengundang dari luar kelompoknya. Pelaksanaan tradisi ini untuk menunjukkan eksistensi bersama hidup rukun sebagai masyarakat Jawa, tanpa melihat latar belakang agama.

“Selamatan itu ‘penjaga’ guyub-rukun di desa. Dulu, waktu saya keterima kerja saya juga bikin selamatan di rumah. Saya pikir, tidak perlu, padahal posisinya sudah di Jakarta. Orangtua pikir itu penting, gak enak sama tetangga.” – wawancara, 1 April 2020

Tidak hanya pada pelaksanaan tradisi, guyub-rukun masyarakat desa di Kabupaten Purworejo juga tampak pada kegiatan keagamaan. Seperti saat acara *haul* (peringatan hari wafat seseorang yang diadakan setahun sekali) Simbah Kyai Iman Syafi'i dari Desa Tlogobulu, *syaban* (kegiatan rutin sebelum memasuki bulan puasa), dan *suran* (selamatan awal Tahun Hijriyah), kelompok agama lain membawakan makanan serta minuman. Begitu juga sebaliknya, ketika kelompok Kristen, Katolik, Hindu, Budha, atau Penghayat Kepercayaan sedang melaksanakan kegiatan kerohanian atau keyakinannya maka kelompok Islam (seperti Banser NU) ikut menjaga ketertiban agar peribadatan kelompok tersebut berjalan lancar. Kegiatan-kegiatan keagamaan itu mencerminkan kedewasaan bermasyarakat di sana, dalam arti masyarakat mampu menempatkan kepentingan masing-masing keyakinan beragama dan urusan kemasyarakatan.

Hal lain yang turut mendukung guyub-rukunnya kehidupan masyarakat desa di Kabupaten Purworejo adalah kegiatan sosial-budaya tradisional. Seperti acara *nguber rowo jombor, kuda kepang, merdi bumi, merti desa* (bersih desa), *kerigan* (kerja bakti atau bakti sosial) membangun rumah warga “bedah rumah”, gotong-royong memperbaiki jalan, dan kegiatan lainnya yang dilakukan secara bersama-sama. Beberapa desa yang sudah mendukung kegiatan sosial-budaya ini melalui Dana Desa, yaitu Desa Kliwonan, Desa Pituruh, Desa Gantung, Desa Pandanrejo, Desa Keligintung, Desa Sidomukti, dan Desa Suren. Kegiatan sosial-budaya ini menjadi ruang-ruang perjumpaan tersendiri bagi

warga. Sering kali pada kegiatan ini terjalin interaksi sosial yang cair dan penuh keterbukaan antar warga sehingga bisa saling memahami dan menghormati.

“Di kampung saya itu masih dilakukan kegiatan gotong-royong, terutama pada saat membangun atau renovasi rumah. Biasanya pas pemasangan genteng itu akan dibantu sama tetangga. Genteng di kampung itu kan satu-satu dipasangnya, beda dengan genteng di kota. Jadi dibantu sama tetangga. Dibayarnya pakai makanan saja” – wawancara, 1 April 2020

C. Kabupaten Tabanan

Kabupaten Tabanan berada di bagian selatan Pulau Bali, Provinsi Bali dengan luas wilayah 839,33 km² yang terdiri dari daerah pegunungan dan pantai. Beberapa wilayah di kabupaten ini merupakan daerah yang cukup subur sehingga menjadi tempat di mana para petani melakukan kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di daerah-daerah yang lain merupakan daerah berbukit-bukit dan terjal. Kabupaten Tabanan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung di sebelah timur dan Samudera Hindia di sebelah selatan. 14,90 persen dari luas Provinsi Bali merupakan wilayah Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan dikenal sebagai daerah agraris karena 28 persen dari luas lahan yang ada merupakan lahan persawahan.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Tabanan tercatat berjumlah 431.162 jiwa dengan laju pertumbuhan alaminya sebesar 0,15. Dari 431.162 jiwa, 214.264 (49,69 %) di antaranya merupakan penduduk laki laki dan 216.898 (50,31 %) merupakan penduduk perempuan. Dilihat dari komposisi penduduknya, rasio jenis kelamin atau sex ratio penduduk Kabupaten Tabanan pada tahun 2010 adalah sebesar 98,79, artinya setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Tabanan terdapat 98 penduduk laki laki. Kabupaten Tabanan dengan luas wilayah sebesar 839 km² dan jumlah penduduk sebanyak 431.162 jiwa, kepadatan penduduknya mencapai 513 jiwa per km². Apabila dilihat tingkat kepadatan penduduk per kecamatan, persebaran penduduk di Kabupaten Tabanan tidak merata. Terdapat beberapa kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya jauh di atas rata-rata, antara lain kecamatan Kediri (1.399 jiwa per km²), Tabanan (1.235 jiwa per km²), Marga (970 jiwa per km²), Kerambitan (930 jiwa per km²), Baturiti (515 jiwa per km²) sedangkan lainnya tingkat kepadatan penduduknya 500 jiwa

per km² ke bawah. Untuk jumlah anggota rumah tangga per keluarga, di Kabupaten Tabanan, jumlah anggota rumah tangga per keluarga sebanyak 4 orang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk suatu daerah antara lain kelahiran, kematian, perpindahan keluar, dan perpindahan ke dalam. Selama tahun 2010 di Kabupaten Tabanan telah terjadi kelahiran sebanyak 3.650 jiwa, kematian 3.012 jiwa, jumlah penduduk yang datang sebanyak 3.816 jiwa dan jumlah penduduk yang pindah sebanyak 2.519 jiwa. Dan pada tahun 2010, di Kabupaten Tabanan tidak ada keluarga yang mengikuti program transmigrasi.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2010 menunjukkan angkatan kerja di Kabupaten Tabanan sebanyak 261.534 jiwa. Dari angkatan kerja yang ada 254.402 jiwa (97,27 persen) di antaranya adalah penduduk yang bekerja, dan sisanya 7.132 (2,73 persen) merupakan pengangguran terbuka. Penduduk angkatan kerja yang berada di Kabupaten Tabanan, penduduknya bekerja di sektor pertanian, yaitu sekitar 43,96 persen. Penduduk angkatan kerja yang bekerja di sektor perdagangan terdapat 44.250 jiwa (17,39 persen), di sektor industri sebanyak 35.313 jiwa (13,88 persen), dan sisanya tersebar di enam sektor lainnya. Jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja di Kabupaten Tabanan sebanyak 82.354 jiwa, di mana 19.249 jiwa (23,37 persen) karena masih bersekolah, 48.697 jiwa (59,13 persen) mengurus rumah tangga dan 14.408 (17,05 persen) karena alasan lainnya⁵.

Potensi Alam dan Sosial di Desa

Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian karena sebagian besar mata pencaharian, soko guru perekonomian daerah, serta penggunaan lahan wilayah Tabanan masih didominasi bidang pertanian dalam arti luas. Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tabanan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Penebel, Kecamatan Pupuan, Kecamatan Marga, dan Kecamatan Baturiti⁶.

⁵ www.tabanankab.go.id

⁶ *ibid*

Dari hasil FGD ditemukan bahwa Karang Taruna, Posyandu Balita/Lansia dan PKK adalah potensi sosial yang dimiliki oleh seluruh desa. Karang Taruna (Sekehe Teruna Teruni) kebanyakan bergerak di bidang olahraga dan kesenian di setiap desa. Dalam banyak kasus, Sekehe Teruna Teruni (STT) adalah tempat belajar bagi anak-anak muda untuk berorganisasi. STT atau yang sering disebut sebagai muda-mudi juga setiap enam bulan menunjukkan bahwa mereka adalah agen kewirausahaan dan ekonomi dengan mengadakan kegiatan bazar atau penggalangan dana, dan biasa dilakukan menjelang hari raya Galungan. Selain itu setiap desa juga memiliki potensi yang beragam. Mulai dari Kelompok-Kelompok Usaha, Sekehe Gong dan Kelompok Tani (*subak*).

Potensi alam yang dimiliki oleh beberapa desa yaitu pertanian dan pariwisata. Kabupaten Tabanan secara keseluruhan merupakan lumbung padi di Provinsi Bali. Rata-rata mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Namun terdapat juga desa yang memiliki potensi wisata seperti air terjun, pantai, maupun potensi seni dan budaya.

Tabel 1. Potensi Desa di Kabupaten Tabanan

No	Potensi Desa	Jumlah	No	Potensi Desa	Jumlah	No	Potensi Desa	Jumlah
1	Karang Taruna	18	16	Peternakan babi	2	31	BPD	1
2	Posyandu Lansia	15	17	Pecalang	2	32	Kelompok Usaha Mikro	1
3	Posyandu Anak	12	18	Kelompok Posbindu	1	33	TPS 3R	1
4	PKK	11	19	Kelompok Seka Seni	1	34	UMKM	1
5	Bumdes	6	20	Kelompok Sadar Wisata	1	35	Ladang	1
6	Kelompok Subak	5	21	Wisata Pantai	1	36	Tukang Stiel Bali	1

7	Seka Gong	5	22	Posyandu Lansia	1	37	Tukang Ukir Kayu	1
8	Kelompok Tani	3	23	Kelompok Kue	1	38	Tukang Ukir Patung	1
9	Kelompok Wanita Tani	2	24	Kelompok Lemon	1	39	Linmas/Kea manan	1
10	UPPO (Unit Pengolahan Pupuk Organik)	2	25	Air Terjun	1	40	KWT Mekar sari	1
11	Kader Posyandu	2	26	Pokdar Was	1	41	TK/PAUD	1
12	Peternakan Babi	2	27	Kelompok Budidaya Ikan	1	42	Seka Angklung	1
13	Bank Sampah	2	28	Organisasi Saman Traya	1	43	Kelompok KWT	1
14	Sawah	2	29	Pertanian	1			
15	Gotong Royong	2	30	Pariwisata	1			

Sumber: Hasil FGD, 28 November 2019

Masalah Sosial di Desa

Masalah sosial merupakan realitas sosial yang kompleks sehingga sumber masalahnya juga bersifat kompleks, dapat berasal dari level individu maupun sistem (Soetomo, 2011). Permasalahan sosial di Kabupaten Tabanan yaitu pernikahan dini, pencurian ternak dan hasil tani, keadilan, kemiskinan, kebersihan lingkungan, akses ke layanan kesehatan dan pengelolaan sampah. Permasalahan sampah merupakan

permasalahan sosial, dianggap masalah yang prioritas oleh masyarakat Kabupaten Tabanan, harus segera diselesaikan.

Penyebab permasalahan sampah yang utama adalah tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dapat diakses oleh tiap desa di Kabupaten Tabanan. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh informan X:

“ Terkait dengan sampah, desa kami berada di pelosok, cukup jauh dari kabupaten, intinya kurang lebih 38 KM dari Kabupaten Tabanan, rata-rata permasalahan di desa kecamatan kami memang sampah, karena kami tidak mempunyai TPA, tempat pembuangan sampah bersama.”- wawancara, November 2019

Permasalahan sampah bukan menjadi permasalahan khas Kabupaten Tabanan, tetapi merupakan permasalahan Provinsi Bali secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian Bali Partnership sebanyak 50 persen sampah di Bali berasal dari tiga daerah, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. 70 persen dari sampah yang dibuang ke tempat sampah berakhir di TPA Sarbagita Suwung. Artinya tidak memadainya fasilitas TPA yang ada di Provinsi Bali, sehingga hanya terkonsentrasi di beberapa tempat sehingga menyulitkan akses masyarakat untuk mengelola sampah di wilayahnya.

Selain disebabkan TPA yang memadai, permasalahan sampah juga disebabkan oleh proses pemilahan sampah yang tidak dilakukan oleh masyarakat dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Agar pengelolaan sampah menjadi lebih mudah dan memiliki nilai tambah, sampah sebaiknya dipilah terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian Bali Partnership, sebanyak 52 persen sampah di Bali tidak dikelola dengan baik, artinya masih ada sampah yang terbuang di sekitarnya, dibakar dan terbuang ke saluran air⁷. Hal tersebut juga ditegaskan oleh informan Y:

“Kalau kita bicara masalah sampah memang ga ada habis-habisnya, kebetulan di desa kami, dulu memang masyarakat buang sampah sembarangan, ada di titik-titik tertentu, seperti di tempat umum, membuang sampah, pake plastik kresek gitu, ditimbun. Karena adanya timbunan sampah

⁷ <https://www.mongabay.co.id/2019/07/02/inilah-data-dan-sumber-sampah-terbaru-di-bali/>

tersebut, akhirnya menimbulkan masalah.”- wawancara tanggal 28 November 2019

Tri Hita Karana Masyarakat Desa

Menghadapi permasalahan sampah, masyarakat di Kabupaten Tabanan telah melakukan beberapa usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Pertama, menggunakan Dana Desa untuk membayar petugas untuk mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Hal ini merupakan solusi jangka pendek agar sampah tidak menumpuk di wilayah desa. Kedua, menyediakan kontainer di setiap banjar sebagai tempat penampungan sampah dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengangkut ke TPA. Hal ini masih dirasakan menyulitkan karena birokrasi yang kurang jelas dan masyarakat merasa sangat tidak terbantu. Hal ini dijelaskan oleh informan Y:

“...desa kami ini sudah kebetulan banjar nya ada empat, kita sudah belikan kontainer yang besar itu untuk masing-masing banjar. Permasalahannya mentok sampai di sana karena seperti dibidang tadi, TPA kita ga punya, kalau saya di desa X itu letaknya di tengah kota pak. Nggak ada lahan. Kita sudah kerja sama dengan DLHK, truknya ktia suruh angkut, membawa ke sana, kita bayar, oke kita keluarkan dana. Ada benturan lagi, katanya dari dinas ga boleh mungut ini. Ini permasalahan yang klasik.” – hasil FGD, 28 November 2020

Ketiga, menyadarkan masyarakat akan pentingnya melakukan pemilahan sampah mulai dari dalam rumah tangga. Sampah plastik dapat dipilah dan disetorkan ke Bank Sampah. Bank Sampah akan menjual ke investor yang membutuhkan dan diolah menjadi biji plastik. Anggota masyarakat yang menjadi nasabah program Bank Sampah dapat memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Sedangkan untuk sampah organik akan diolah menjadi pupuk. Sehingga pada gilirannya masyarakat sadar dan berperan dalam menjaga lingkungan.

D. Rukun dan Tri Hita Karana di dalam Masyarakat Desa di Purworejo dan Tabanan

Desa dan masyarakat saling terkait satu sama lain karena keberadaan masyarakat membentuk desa, di sisi lain desa mengatur bagaimana masyarakat bertindak dan berperilaku. Beberapa literatur dalam ilmu sosial yang mengkaji mengenai desa di Jawa, misalnya, melihat desa sebagai sebuah satuan komunitas sosial. James Scott (1976) mendefinisikan desa sebagai sebuah kesatuan besar sosial. Dalam bukunya, Scott melihat desa sebagai komunitas korporat dari petani, mereka memiliki nilai-nilai tersendiri dalam unit komunitasnya, yang akhirnya dikenal sebagai konsep *moral economy*. Sebelum studi James Scott, Eric Wolf (1957) melihat desa layaknya organisasi korporat yang memiliki seperangkat aturan berisikan hak-hak dan ketentuan keanggotaan di dalam desa. Melalui dua tulisan ini terlihat bahwa desa identik dengan masyarakat yang berada di dalamnya.

Peter Boomgaard (1991:291) berargumen bahwa setidaknya ada tiga terminologi desa, yaitu pertama, desa merupakan sebuah kluster fisik tempat tinggal, baik desa kecil maupun yang lebih luas. Kedua, desa dilihat sebagai unit administratif. Sebagai unit administratif desa identik dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan kekuasaan di atasnya, misalnya saja kerajaan atau negara. Keberadaan desa sebagai pengatur masyarakat dalam skala yang lebih kecil dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Terakhir, desa merupakan unit komunal yang memiliki kohesi sosial yang menentukan keberadaan komunitas di dalam desa, baik dalam hal kepentingan desa dan solusi dalam menghadapi konflik. Terminologi terakhir lebih melihat relasi sosial di dalam masyarakat yang menjadi pengikat sekaligus penjaga keseimbangan di desa. Sebuah desa dapat terjaga ‘kedamaiannya’ atau berada dalam kondisi harmoni tergantung dari ikatan dari masyarakatnya.

Pada desa di Jawa, filosofi mengenai rukun dikenal dalam relasi sosial masyarakat. Beberapa literatur telah melihat bagaimana filosofi rukun menjadi bagian dari praktik hidup orang Jawa (lihat Jay, 1969; Geertz, 1976; Koentjaraningrat 1985). Clifford Geertz (1976:61) melihat rukun tidak hanya sebagai sebuah nilai yang abstrak tetapi juga dapat terlihat kepada praktik kerjasama yang ada di masyarakat. Dalam konteks penelitian Geertz saat itu, Ia melihat bahwa rukun menjadi dasar dalam pembagian kerja dan pertukaran kapital, seperti pembangunan rumah, pengolahan sawah, dan irigasi. Pertukaran kapital dalam konteks rukun juga terlihat dalam acara *selamatan*

di desa. Pada acara *selamatan* sunat misalnya, Geertz mencontohkan pemberian *buwuh*⁸ sebagai alat penjaga kerukunan oleh karena itu setiap orang yang sudah mendapatkan undangan dan sebelumnya sudah pernah diberikan *buwuh* oleh tetangganya harus membalasnya pada saat tetangga tersebut melakukan hajatan yang serupa. Saling membalas *buwuh* ini tetap dilakukan sebagai salah satu bentuk menjaga kondisi rukun di desa. Lebih tajam lagi, Andrew A Beatty (1999:47) beranggapan bahwa *selamatan* merupakan bentuk kompromi sosial sekaligus merupakan kunci kerukunan karena tiap-tiap masyarakat diingat dan dinilai bukan dari identitas bawaan mereka melainkan apa yang sudah mereka berikan sebagai kontribusi di dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, filosofi rukun juga mulai dipertanyakan eksistensinya pada orang Jawa terutama bagi mereka yang sudah tidak tinggal di desa. Apakah rukun masih bisa dianggap sebagai dasar orang Jawa dalam berperilaku? Hal ini dipertanyakan juga oleh Mary Hawkins (1996) apakah filosofi rukun juga berubah dalam pandangan orang Jawa kontemporer. Bagi Hawkins pertumbuhan daerah menjadi kota dan masuknya modernitas malah tetap melanggengkan keberadaan filosofi rukun di dalam kehidupan orang Jawa yang berada di daerah urban bahkan yang berada di luar Pulau Jawa. Rukun tetap ada dalam bentuk *selamatan* dan *arisan*, misalnya saja dalam *selamatan* yang diadakan seseorang setelah melakukan ibadah haji. Melalui *selamatan* dan *arisan* terlihat bahwa rukun masih eksis sebagai nilai yang dipegang dalam kehidupan orang Jawa.

Di sisi lain, bagi masyarakat Hindu Bali dikenal filosofi harmoni bernama Tri Hita Karana. Apabila konsep rukun di Jawa menjelaskan pentingnya relasi harmoni di antara masyarakat, filosofi Tri Hita Karana melihat harmoni sebagai dasar moral dari relasi di antara Tuhan kepada manusia, antar sesama manusia, dan juga antara manusia dan alam (Warren, 2007; Ramstedt, 2014). Bagi Sukarma (2016:88), Tri Hita Karana adalah sebuah apresiasi dari Tuhan yang memberikan kemampuan untuk mengetahui dan mengerti bahwa esensi kuasa pekerjaan Tuhan yang dapat membentuk kehidupan sosial dalam masyarakat dan juga relasi dengan lingkungan. Karena Tri Hita Karana merupakan sebuah dasar moral yang mengatur juga relasi dengan alam, oleh karena itu filosofi ini dapat terlihat juga dalam pengaturan sistem irigasi tradisional Bali yang dikenal dengan

⁸ Kontribusi berupa uang atau makanan yang diberikan tetangga atau keluarga besar dalam rangka mengganti keramah-tamahan yang diberikan oleh si penyelenggara hajatan

subak. Wisnu Wardana dan Putu Sudira (1999) membahas mengenai penerapan nilai Tri Hita Karana dalam *subak*, mereka berargumentasi bahwa terdapat nilai Tri Hita Karana dalam konstruksi, operasi, dan perawatan sistem *subak* di Bali. Semua ini dilakukan masyarakat demi terciptanya harmoni.

Masuk ke dalam permasalahan sosial yang terjadi di kedua daerah, berdasarkan FGD yang dilakukan di Purworejo dan Tabanan penyelesaian masalah dapat dicapai sesuai dengan filosofi rukun dan Tri Hita Karana yang ada di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat desa di Kabupaten Purworejo dan Tabanan permasalahan selalu dicoba diselesaikan terlebih dahulu dan apabila dipandang berat baru akan masuk ke pengadilan. Hal ini disebabkan adanya perasaan di dalam masyarakat yang menganggap bahwa kerukunan di dalam masyarakat harus diutamakan. Akan tetapi, perasaan wajib untuk menjaga keseimbangan ini tidak hanya muncul pada saat ada masalah namun juga muncul dalam suasana tenang. Misalnya dalam hal pengadaan *selamatan* selain sebagai bentuk ucapan syukur juga menjadi sarana untuk membalas kebaikan tetangga yang sebelumnya.

Di Tabanan dikenal kegiatan adat *ngayah* atau *ayahan* yang berarti sumbangan tenaga kerja pada saat ada seseorang yang membutuhkan bantuan dalam menyelenggarakan selamatan. Bagi Warren (2007:175) *ayahan* merupakan jantung dari hubungan di dalam masyarakat, di samping itu *ayahan* juga merupakan kewajiban yang mengikat masyarakat dan merupakan perilaku baik dalam pengertian kebanyakan orang Bali. Sama halnya dengan *buwuh* pada orang Jawa, *ngayah* mengikat rasa tanggung jawab individu untuk membantu dikarenakan adanya sumbangan dalam bentuk tenaga kerja atau *ayahan* yang menjadi pengikat antar mereka dalam suatu organisasi. Apabila seseorang atau keluarga tidak mengikuti *ngayah* maka keluarga tersebut akan dikenakan denda atau dalam bentuk yang lebih berat akan dikeluarkan dari organisasi adat yang ada di desa tersebut. Hal lain yang mendukung terjaganya tradisi *ngayah* di suatu desa adalah perasaan malu yang menghantui individu yang tidak mengindahkannya.

Kalau enggak ikut ngayah itu kena denda atau kalau sudah parah dikeluarkan dari adat... (dendanya) gak (besar) sih tapi malunya itu loh... [D]endanya berupa uang 50.000, uang kepeng, semen, pasir, bata/batako yang digunakan untuk pembangunan fisik – wawancara, 6 Juni 2020

Di sisi lain, di Tabanan filosofi Tri Hita Karana bahkan muncul dalam upaya pengelolaan sampah yang ada di desa. Sebelum adanya TPA, banyak keluarga mengelola sampahnya sendiri dengan cara dibakar atau dikumpulkan di belakang rumah. Sebelum sampah dibakar, biasanya mereka akan membuat lubang untuk menampung sampah. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam. Beberapa keluarga bahkan memisahkan sampah organik dan non-organik untuk kemudian dijadikan pupuk tanaman. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kesadaran masyarakat untuk menjaga keseimbangan lingkungan menjadi kecil, banyak dari mereka yang hanya menumpuk sampah tanpa dipisahkan terlebih dahulu. Meskipun belum banyak yang menyadari, nilai-nilai Tri Hita Karana dalam menjaga keseimbangan lingkungan mulai kembali digaungkan oleh beberapa orang yang berpengaruh di desa, di antaranya kepala desa dan penyuluh sosial yang dipilih dari masyarakat. Pengelolaan sampah diupayakan dapat berjalan dengan baik, bahkan sampai dikirimkan kepada bank sampah untuk mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan. Jalan ini diambil sebagai bentuk upaya menjaga keseimbangan di antara masyarakat dan alam.

Apabila diperhatikan kembali, keberadaan aktor menjadi penting dalam menjaga dan menjamin terwujudnya harmoni dalam masyarakat. Aktor-aktor dalam masyarakat muncul sebagai mediator di antara perbedaan pendapat dan keinginan masyarakat, terlebih sebagai penjaga filosofi atau nilai yang ada di dalam masyarakat, seperti keberadaan kepala desa, orang-orang yang dituakan serta tokoh lain yang berpengaruh di dalam masyarakat. Tulisan Patrojani dan Affif (2018) melihat keberadaan aktor di dalam kekerabatan sebagai pranata sosial di Sumatera Barat dapat mempengaruhi proyek pembangunan irigasi di Sumatera Barat. Di dalam tulisannya Patrojani dan Affif melihat agency pada aktor di dalam kekerabatan setempat memiliki kemampuan untuk menghimpun dukungan dan melakukan protes terhadap kebijakan pembangunan irigasi.

Kemunculan aktor dalam menjaga harmoni di masyarakat juga muncul di Purworejo dan Tabanan, dalam bentuk kepala kampung, *pedanda* atau *pandita* (Pendeta tinggi Hindu Bali), orang-orang yang dituakan, *kelihan* adat atau *banjar*, *tempek*, *pekaseh subak*, *pemangku*, *sutri agung*, dan tokoh-tokoh agama. Keberadaan mereka mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil di desa sebelum dapat diimplementasikan. Aktor-aktor ini muncul bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan nilai yang sudah ada di dalam masyarakat, dalam hal ini adalah rukun dan Tri Hita

Karana. Hal ini sejalan dengan pendapat Sherry Ortner (2011) yang melihat aktor di masyarakat dalam dua bentuk modalitas, yaitu *agency as power* dan *agency as intention*. Para aktor di atas muncul bukan semata sebagai legitimasi kekuasaan tetapi untuk menjaga nilai internal yang ada dalam budaya setempat, dalam hal ini adalah nilai rukun dan Tri Hita Karana. Dalam tulisan ini, terlihat dalam pengakuan informan di Purworejo, bahwa orang tua menjadi penting untuk kembali mengadakan *selametan* sebagai bentuk pandangan baik yang harus dilakukan di dalam masyarakat. Kemudian keberadaan kepala desa dan penyuluh sosial turut menjadi aktor penting dalam berkontribusi memberikan edukasi untuk menjaga lingkungan sekaligus tetap menghidupi filosofi Tri Hita Karana.

SIMPULAN

Melalui tulisan ini penulis mendapati bahwa ketahanan sosial masyarakat dan harmoni merupakan hal yang saling bersisian dan berhubungan timbal balik, terutama dalam konteks masyarakat di Purworejo dan Tabanan. Harmoni terwujud di dalam masyarakat melalui filosofi rukun dan Tri Hita Karana untuk menjaga ketahanan sosial masyarakat. Hal ini terwujud di dalam relasi sosial dan interaksi bermasyarakat. Relasi di antara masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui berbagai bentuk, salah satunya keberadaan *selametan* dan *ayahan*. Melalui dua kegiatan tersebut masyarakat di Purworejo dan Tabanan menunjukkan bahwa mereka masih menjaga sebuah kompromi sosial di tengah dinamika kemajuan zaman. Hal lain yang tidak kalah penting ditunjukkan oleh masyarakat Tabanan, yaitu menjaga harmoni dengan alam melalui kegiatan pengolahan sampah. Dalam hal ini konsep Tri Hita Karana masih dipegang oleh masyarakat Tabanan untuk menjaga keseimbangan harmoni dengan alam.

Sementara itu, tulisan di atas menunjukkan peran aktor tidak dapat diabaikan dalam menjaga harmoni masyarakat. Para pemangku adat, tokoh, agama, dan orang yang dituakan penting perannya untuk menjaga sekaligus meneruskan perilaku ini pada generasi selanjutnya. Dengan dipertahankan dan dipromosikan terus menerus, filosofi rukun dan Tri Hita Karana akan membentuk ikatan di antara masyarakat. Misalnya, dengan tetap melakukan *selametan* walaupun sudah tidak tinggal di desanya lagi, serta tetap mengikuti *ayahan* yang dilakukan di desa, atau menyebarkan edukasi mengenai pengelolaan sampah yang baik agar alam tetap terjaga keseimbangannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketahanan sosial masyarakat dan harmoni tidak dapat

dipisahkan dan hal tersebut dapat terjaga berkat peran keberadaan aktor-aktor yang menjaga filosofi tersebut di dalam masyarakat.

ACKNOWLEDGEMENT

Terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial - Kementerian Sosial RI, dimana para penulis telah dilibatkan dalam “Action Research Desa Berketahanan Sosial Tahun 2019”. Bahwa ide dan gagasan artikel ini lahir dari *Action Research* tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Adamson, C. (2007). Gendered Anxieties: Islam, Women's Rights, and Moral Hierarchy in Java. *Anthropological Quarterly* 80(1): 5–37
- Asmamaw, M., Mereta S. T., & Ambelu A. (2019). Exploring households' resilience to climate change-induced shocks using Climate Resilience Index in Dinki watershed, central highlands of Ethiopia. *PLoS ONE* 14(7): e0219393. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219393>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. (2020). *Kabupaten Purworejo dalam Angka 2019*. Purworejo: CV Berguna.
- Beatty, A. (1999). *Varieties of Javanese Religion: An anthropological account*. New York: Cambridge University Press.
- Boomgaard, P. (1991). The Javanese village as a Cheshire cat: The Java debate against a European and Latin American background dalam *The Journal of Peasant Studies*. (18)2, 288-304, DOI: 10.1080/03066159108438453
- Coser, L. A. (1956). *The Functions of Social Conflicts*. New York: Routledge.
- Costa, M. M., Máñez, K. S., & Paragay, S. H. (2013). *Climate Change: International Law and Global Governance Book*. Nomos Verlagsgesellschaft mbH
- Hanisch, M. (2016). What is resilience? Ambiguities of Key Term. Federal Academy for Security Policy. *Security Policy Working Paper* No. 19
- Hawkins, M. (1996). Is Rukun Dead? Ethnographic Interpretations of Social Change and Javanese Culture dalam *The Journal of Australian Anthropology*. 7(3)
- Henley, D. & Davidson, J. S. (2007). Introduction: radical conservatism – the protean politics of adat dalam Jamie S. Davidson dan David Henley (eds). *The revival of tradition in Indonesian politics : the deployment of adat from colonialism to indigenism*. New York: Routledge.
- Holling, C. S. (1973). Resilience and Stability of Ecological Systems dalam *Annual Review of Ecology and Systematics*, 4. Pp. 1-23
- Jay, R. R. (1969). *Javanese Villagers: Social Relations in Rural Modjokuto*. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.
- Johnson, C. (2009). *Arresting development : the power of knowledge for social change*. New York: Routledge.
- Kementerian Sosial. (2006). Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 12/HUK/2006 Tentang Model Pemberdayaan Pranata Sosial Dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial, Jakarta: Kementerian Sosial.

- Koentjaraningrat. (1985). *Javanese Culture*. Singapore: Oxford University Press.
- Meadows, S., Miller, L., & Robson, S. (2015). *Airman And Family Resilience*. California: RAND Corporation.
- Newberry, J. (2013). *Back Door Java: Negara, Rumah Tangga, dan Kampung di Keluarga Jawa*. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Ortner, S. B. (2011). Specifying Agency The Comaroffs and Their Critics, *Interventions*, 3:1, 76-84, DOI: 10.1080/13698010020027038
- Patrojani, P. D. & Surraya, A. (2018). Kekerabatan sebagai Pranata Sosial yang Mempengaruhi Agency Perlawanan Masyarakat: Studi Kasus Protes Petani terhadap Proyek Pembangunan Irigasi di Sumatra Barat dalam *Antropologi Indonesia*. 39(2). Pp. 157-175
- Purnamasari, D. E. (2015). Solidaritas Mekanik Komunitas Islam Dan Kristen Di Desa Kamijoro Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. *FIS* Vol. 42 No. 2 Desember 2015, hal. 161-176 <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS>
- Rahnema, M. (1997). Towards post-development: searching for signposts, a new language and new paradigms. Dalam : (M. Rahnema and V. Bawtree, eds) *The Post-Development Reader*; Zed Books; London: pp. 377-404.
- Ramstedt, M. (2014). Discordant temporalities in Bali's new village jurisdictions, *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 46:1, 60-78, DOI: 10.1080/07329113.2014.893722
- Scott, J. C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant; Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, New Haven, CT/London: Yale University Press.
- Sukarma, I. W. (2016). Tri Hita Karana: Theoretical Basic of Moral Hindu dalam *International Journal of Linguistics, Language, and Culture*. 2(9). Pp. 84-96.
- Suradi, dkk. (2019). *Pembentukan Desa Berketahanan Sosial*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Suryanto. (2020). Bahan presentasi ‘Pembahasan Topik Penelitian Penguatan Ketahanan Keluarga dan Masyarakat dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan’. Disajikan dalam Seminar Daring Rancangan Penelitian Grand Desain Riset Topik Penelitian: Penguatan Ketahanan Keluarga dan Masyarakat dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan. Kedepatian Bidang IPSK-LIPI, 22 Juli 2020
- Wardana, W. & Sudira, P. (1999). Penerapan Tri Hita Karana dalam Perancangan, Pembangunan, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Subak dalam *Agritech* 19(2). Pp. 59-65.

Warren, C. (2007). Adat in Balinese discourse and practice: locating citizenship and the commonweal dalam Jamie S. Davidson dan David Henley (eds). *The revival of tradition in Indonesian politics : the deployment of adat from colonialism to indigenism*. New York: Routledge.

Wolf, E. R. (1957). Closed Corporate Peasant Communities in Mesoamerica and Central Java, *Southwestern Journal of Anthropology*, Vol.13, No.1